



Pengaruh Pendekatan *Probing-Prompting Learning (PPL)* Terhadap Peningkatan Kemampuan Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila

Dinie Anggraeni Dewi✉

Informasi artikel	ABSTRAK
<p>Sejarah Artikel : Diterima November 2018 Revisi Desember 2018 Dipublikasikan Januari 2019</p>	<p>Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendekatan <i>probing-prompting learning</i> terhadap peningkatan tingkat kemampuan pemahaman nilai-nilai pancasila dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, serta mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan pendekatan <i>probing-prompting learning</i>. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuasi eksperimen, dengan desain penelitian <i>non-equivalent control group design</i>. Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 18 Bandung. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII-3 sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII-4 sebagai kelas kontrol. Berdasarkan analisis terhadap hasil tes kemampuan pemahaman nilai-nilai pancasila diperoleh simpulan yaitu ada pengaruh pendekatan <i>probing-prompting learning</i> terhadap peningkatan tingkat kemampuan pemahaman nilai-nilai pancasila. Sedangkan berdasarkan analisis terhadap lembar angket diperoleh simpulan bahwa siswa merespon positif terhadap pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan pendekatan <i>probing-prompting learning</i>.</p>
<p>Keywords : <i>Probing-prompting learning approach values pancasila</i></p>	ABSTRACT
<p>How to Cite : Dini Anggraeni. D. (2019). Pengaruh Pendekatan <i>Probing-Prompting Learning (PPL)</i> Terhadap Peningkatan Kemampuan Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila. <i>Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan</i>, 4(1), pp. 34- 44. DOI: http://dx.doi.org/10.24269/jpk.v4.n1.2019.pp34-44</p>	<p>The Influence of the <i>Probing-Prompting Learning (PPL)</i> Approach on Increasing the Ability of Understanding Pancasila Values. Purpose in this research is to know influence of <i>probing-prompting learning approach</i> for increasing student's vaules pancasila understanding ability in civic education learning and to know students respon for civic education learning with <i>probing-prompting learning approach</i>. The method used in this research is quasi experiment method, with research design <i>non-equivalent control group design</i>. This research done at junior high school 18 Bandung. Sample in this research is student VIII-3's class as experiment class and VIII-4's class as control. Based on analysis result values pancasila understanding ability test got conclusion that is the found influence of <i>probing-prompting learning approach</i> for increasing student's vaules pancasila understanding ability. Meanwhile, based on quistionnarie analysis, conclusion can be drawn that students respond positively towards civic education learning through <i>probing-prompting learning approach</i></p>
<p>✉ Alamat korespondensi: Universitas Islam Nusantara</p>	
<p>✉ E-mail: anggraenidewidhinie@gmail.com</p>	

Copyright © 2019 Universitas Muhammadiyah Ponorogo

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pendidikan merupakan aspek penting bagi bangsa Indonesia ini. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila yang membentuk peserta didik berakhlak mulia yang berakar pada nilai-nilai agama, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Hal itu menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berperan dalam memberikan pengetahuan saja

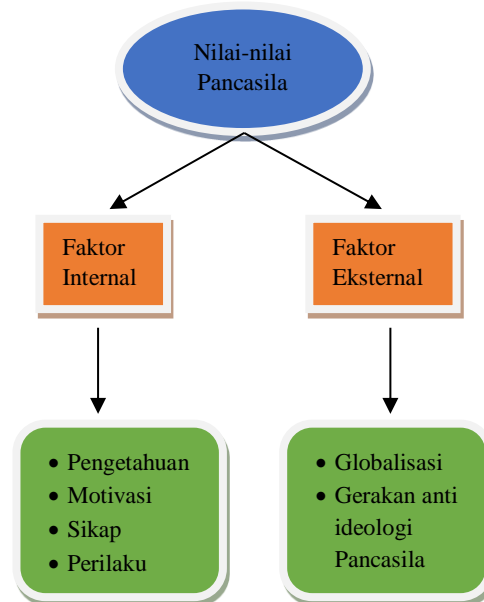
akan tetapi juga dalam rangka mengembangkan karakter dan jati diri bangsa.

Berbicara terkait karakter dan jati diri bangsa, maka tidak akan lepas dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai pancasila tersebut sangat penting bagi kemajuan bangsa Indonesia. Dalam hal ini pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan Negara sehingga tercapai kesejahteraan. Pranarka (1985:285) mengatakan bahwa pancasila itu adalah ideologi nasional.

Pancasila yang kita yakini sebagai cerminan kepribadian Bangsa Indonesia setidaknya harus selalu diamalkan dalam sikap maupun perilaku bangsa ini. Fenomena yang tampak menunjukkan bahwa terjadi sebuah ambivalensi yang membuat kita prihatin yaitu nilai-nilai pancasila tersebut kian hari kian terkikis, hal tersebut dapat dilihat dari sikap yang tidak mencerminkan implementasi dari nilai fundamental bangsa ini. Kasus-kasus yang terkait fenomena tersebut antara lain masih banyak terjadi konflik-konflik yang terjadi seperti konflik suku, konflik antar agama, konflik antar kelompok sosial dan lain-lain. Selain itu, banyak sekali perilaku-perilaku menyimpang baik yang bersifat pelanggaran maupun kejahatan yang pada dasarnya bertentangan dengan nilai-nilai pancasila.

Sebuah data menunjukkan bahwa angka aborsi di Indonesia diperkirakan mencapai 2,3 juta pertahun. Sekitar 750.000 diantaranya dilakukan oleh remaja. (Soetjiningsih, 2008). Sedangkan hasil penelitian yayasan Kusuma Buana menunjukkan bahwa sebanyak 10,3% dari 3,594 remaja di kota besar di Indonesia telah melakukan hubungan seks bebas (Bening, 2004). Penelitian Komnas Perlindungan Anak (KPAI) dari 33 Provinsi menyimpulkan empat hal: pertama, 97% remaja SMP dan SMA pernah menonton film porno. Kedua, 93,7 % remaja SMP dan SMA pernah ciuman, *genital stimulation* (meraba alat kelamin) dan oral seks. Ketiga, 62,7% remaja SMP tidak perawan. Keempat, 21,2% remaja pernah aborsi. Hal tersebut menjadi pukulan hebat bagi para generasi muda saat ini, dan ancaman nyata bagi bangsa Indonesia. Perilaku tersebut sangat jelas bertentangan dengan nilai-nilai pancasila yang terkandung dalam nilai-nilai luhur pancasila.

Nilai yang terdapat dalam pancasila tidak boleh hanya dipandang sebagai simbolik saja, akan tetapi harus dikuatkan dalam setiap diri generasi muda bangsa saat ini sehingga akan tampak dalam sikap dan perilaku di kehidupan sehari-hari. ancaman bagi pelaksanaan nilai-nilai pancasila dapat dipetakan secara jelas dalam gambar berikut ini :



Gambar 1. Ancaman pelaksanaan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan

Gambar di atas menjelaskan bahwa ancaman bagi pelaksanaan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan dipengaruhi oleh dua faktor penting. Kesadaran individu akan pentingnya nilai-nilai pancasila sebagai dasar awal dalam mengatasi faktor internal ancaman terhadap pelaksanaan nilai-nilai pancasila. Individu yang memiliki kesadaran yang kuat dalam mengembangkan nilai-nilai pancasila maka mereka tidak akan terpengaruh oleh berbagai faktor eksternal yang muncul.

Hasil data yang diperoleh dilapangan yaitu di SMPN 18 Bandung, menunjukkan bahwa motivasi dan semangat setiap siswa dalam menerapkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari masih perlu dikuatkan kembali. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya perilaku dan sikap yang menunjukkan atau mencerminkan ketidaksesuaian dengan esensi nilai-nilai pancasila. Gambar tentang melemahnya semangat dan motivasi siswa dalam menerapkan nilai-nilai pancasila sebagai berikut:



Gambar 2. semangat dan motivasi siswa dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila

Proses historisitas merupakan suatu proses dimana siswa mampu memahami sejarah terbentuknya pancasila sebagai nilai fundamental bangsa. Proses aktualitas adalah penerapan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan dalam bentuk sikap dan perilaku. Sedangkan proses rasionalitas adalah proses pembentukan pemikiran yang meyakini dan membenarkan bahwa nilai-nilai pancasila merupakan nilai fundamental yang perlu dikembangkan.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) semestinya mendapat perhatian besar karena memiliki fungsi strategis sebagai pendidikan nilai moral sekaligus saluran formal- kurikulum bagi pendidikan pancasila. Kebutuhan suatu negara terhadap keberadaan generasi penerus yang tidak hanya memiliki keunggulan akademik, tapi juga berkepribadian unggul jelas merupakan bagian dari *nation and character building*.

Fundamen kehidupan berbangsa dan bernegara pun akan terus kokoh manakala pendidikan karakter dan pancasila berhasil diterapkan sehingga keberlangsungan pembangunan guna meraih tujuan nasional segera tercapai. Dengan kata lain, tidak ada tugas dan peranan yang lebih penting dalam mengembangkan warga negara yang bertanggung jawab, efektif, dan terdidik selain melalui pendidikan.

Pendidikan Kewarganegaraan atau yang dikenal dengan PKn memiliki dua pengertian dari serapan bahasa asing ke dalam Bahasa Indonesia. *Pertama*, PKn diartikan dalam makna *civic education* atau mata pelajaran dasar sebagai upaya penyiapan warga negara (Winataputra dan Budimansyah, 2012, Hlm. 11). Makna *kedua*, PKn sebagai *citizenship education* atau konsep yang lebih luas dari *civic education* sebab memaknai PKn tidak semata terbatas program pendidikan formal tetapi juga berbagai kegiatan yang ada di masyarakat.

Dilihat dari landasan yuridisnya, "Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan

untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air." (Penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional). Tujuan tersebut kemudian dirincikan ke ruang lingkup PKn dalam kurikulum nasional yang meliputi delapan tema pokok, yaitu a) persatuan dan kesatuan bangsa; b) norma, hukum dan peraturan; c) hak asasi manusia; d) konstitusi negara; e) kehidupan sosial bermasyarakat; f) kekuasaan dan politik; g) Pancasila dan; h) globalisasi (BSNP, 2006).

Ruang lingkup PKn di atas semakin mengokohkan status PKn sebagai pendidikan demokrasi di Indonesia. Winataputra dan Budimansyah (2012, Hlm. 223) menguraikan hubungan praksis antara demokrasi dan pendidikan demokrasi dengan menyebut pendidikan demokrasi sebagai fasilitator bagi warga negara untuk memahami konsep dan prinsip demokrasi.

Dalam pendidikan demokrasi, warga negara bukan hanya diajarkan tentang pengertian, konsep, dan prinsip demokrasi, melainkan juga bagaimana memahami, menghayati, mengamalkan, mengembangkan konsep, prinsip, dan nilai demokrasi sesuai dengan status dan perannya dalam masyarakat. Sundawa (dalam Komalasari, 2010, Hlm. 98) turut menyebut PKn memiliki formal-pedagogis untuk mendidik warga negara yang demokratis dalam konteks pendidikan formal.

Visi formal-pedagogis tersebut menjadikan PKn sebagai mata pelajaran dan mata perkuliahan untuk mendidik warga negara yang Pancasila, yaitu warga negara yang mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat demokrasi, untuk menggunakan hak dan melapaskan tanggung jawabnya dengan pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan. Ghofir (dalam Komalasari, 2010, Hlm. 230-231) turut menjelaskan urgensi PKn dalam rangka menciptakan masyarakat madani di Indonesia. Keberadaan masyarakat madani tersebut dapat dicapai manakala PKn mampu menciptakan warga negara yang memiliki partisipasi bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik, baik lokal, regional, dan internasional.

Kondisi pengamalan pancasila di Indonesia yang belum mapan merupakan cerminan dari proses pendidikan pancasila itu sendiri. Uraian di depan tentang perilaku sebagian masyarakat sedikit menjawab pertanyaan, "Bagaimana pelaksanaan pendidikan pancasila di ranah formal (PKn)

selama ini?” Wahab dan Sapriya (2011, Hlm. 50) mengkritik pembelajaran demokrasi yang terkesan “*though*” dan bukan “*learned*”. PKn selama ini berfokus pada domain pengetahuan atau *knowledge oriented* sehingga aspek- aspek kognitif semata yang mendapat perhatian lebih serius.

Padahal jika dicermati, PKn lebih dominan berisi materi-materi afektif, yaitu tentang nilai dan moral dalam rangka pembentukan karakter warga negara. PKn yang terlanjur kognitif-sentris dapat disaksikan dari ragam evaluasi PKn yang dari dulu belum bisa lepas dari *multiple choice* yang berbentuk pilihan jawaban atas pertanyaan tentang “*apa*” dan bukan “*bagaimana*” atau “*mengapa*”. Kondisi demikian digambarkan oleh David Kerr (1995) sebagai PKn yang masih berada pada kontinum minimal, yaitu ditandai dengan “*thin, exclusive, elitist, civics education, formal, content led, knowledge-based, didactic transmission, easier to achieve and measure in practice*”.

Pemahaman Kerr ini dimaksudkan bahwa PKn hanya didefinisikan secara sempit, hanya mewadahi aspirasi tertentu, berbentuk pengajaran kewarganegaraan semata, bersifat formal, terikat isi, berorientasi pada pengetahuan, menitikberatkan pada proses pembelajaran, dan hasilnya mudah terukur (Winataputra dan Budimansyah, 2012, Hlm. 6).

Dalam kaitan sebagai pendidikan demokrasi, PKn di Indonesia belum beranjak dari “*education about citizenship*” yang hanya mengajarkan “*about democracy*”. Kondisi ini berbanding terbalik dengan *civic education* di negara- negara maju seperti di belahan Amerika Utara, Eropa, dan Australia yang sudah berbentuk *citizenship education* sehingga sudah berciri “*education for citizenship*” dan prinsip demokrasi telah menjadi perilaku keseharian.

PKn jika dianalisis secara cermat dari sisi ide, instrumentasi, maupun praksisnya memiliki kemiripan dengan *civic education* di negara yang memperoleh predikat maksimal dalam pembelajaran kewarganegaraan, yaitu Amerika Serikat. Namun problem utama perubahan PKn di Indonesia dari bandul minimal menuju maksimal terletak pada nuansa kurikulumnya yang masih bersifat indoktrinasi. Komponen warga negara dalam PKn yang terdiri dari *civic knowledge, civic skill, dan civic disposition* masih menitikberatkan pada komponen pengetahuan (*civic knowledge*) saja. Kedua komponen yang lain, keterampilan

kewarganegaraan dan watak kewarganegaraan, belum tergarap dengan optimal. Ujung-ujungnya terjadi paradoks antara nilai dan fakta yaitu kesenjangan antara konsep dan muatan nilai yang diajarkan PKn dengan fenomena sosial, kultur, politik, ideologis, dan religiusitas yang dilihat oleh para peserta didik. Ketika mereka didoktrin dengan nilai-nilai ideal Pancasila, namun di media cetak, televisi, dan internet setiap hari terpampang berita tentang kekerasan, kebohongan publik, arogansi, korupsi kolektif, pemalsuan ijazah, mafia peradilan, dan sebagainya. Sundawa (dalam Komalasari, 2010, Hlm. 100) kemudian menawarkan solusi tentang perlunya pembelajaran PKn, sebagai pendidikan demokrasi sekaligus pendidikan nilai, menjadi pembelajaran yang penuh makna (*meaningfull learning*) demi mengembangkan kehidupan dan perilaku peserta didik.

Dalam *Framework for 21st Century Learning* telah digambarkan bahwa *core* dalam pendidikan di abad ini memang menekankan pada pembelajaran yang inovatif. Pembelajaran tersebut tidak hanya berisi tentang aspek pengetahuan, tetapi juga keterampilan yang inovatif, pembelajaran hidup dan keterampilan berkarir, serta pemanfaatan media informasi dengan menggunakan keterampilan memanfaatkan teknologi.

Strategi pembelajaran yang menekankan pada kegiatan inovatif tentang pemahaman akan pentingnya nilai-nilai pancasila adalah dengan pendekatan *probing-prompting learning* menggunakan struktur *three-minutes review*. Pendekatan *probing-prompting learning* yaitu suatu pendekatan pembelajaran dimana guru menuntun siswa menggali gagasannya dengan mengajukan pertanyaan, sehingga siswa dapat berpikir pada tingkatan yang lebih tinggi. Siswa pun dalam menjawab pertanyaan dituntut untuk mampu memahami konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. *Probing*, berarti masalah dituangkan dalam pertanyaan yang ditujukan oleh guru kepada siswa, sedangkan *prompting* berarti bantuan, diberikan kepada siswa dengan menuntun siswa berpikir. Penggunaan struktur *three-minutes review* bertujuan agar siswa antusias dalam pembelajaran. Dimana struktur ini dirancang agar siswa aktif dan memberikan kesempatan kepada siswa melakukan tinjauan. Sehingga dengan melakukan tinjauan dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru, secara tidak langsung siswa mengenal,

menganalisis, memahami dan menerapkan konsep inti dari pendidikan kewarganegaraan.

Menurut Ngalimun (2012:15) Model pembelajaran *probing prompting* adalah pembelajaran yang menyajikan serangkaian pertanyaan yang sifatnya menuntun dan menggali sehingga terjadi proses berpikir yang mengaitkan pengetahuan setiap siswa dan pengalamannya dengan pengetahuan baru yang sedang dipelajari. Model pembelajaran tersebut dalam pendidikan kewarganegaraan maksudnya sebagai suatu proses pembelajaran untuk meningkatkan *civic knowledge, civic skills, dan civic dispositions*

Model pembelajaran *probing prompting* adalah pembelajaran yang terdiri dari dua tahap yaitu *probing* dan *prompting*. Suherman (2003:67) juga menyatakan bahwa *probing* adalah sejumlah pertanyaan yang bersifat menggali, menganalisis, bahkan mengkaji untuk mendapatkan jawaban yang lebih lanjut dari siswa yang bermaksud mengembangkan kualitas jawaban, sehingga jawaban berikutnya lebih jelas, akurat serta lebih beralasan. Melalui proses *probing*, guru berusaha untuk membuat siswanya menjelaskan lebih jauh tentang jawaban secara jelas, akurat dan valid sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kedalaman pembahasan.

Jacobsen (2009:45) menyatakan bahwa *prompting* adalah cara dengan melibatkan penggunaan isyarat, atau petunjuk, yang digunakan untuk membantu siswa menjawab dengan jelas, akurat dan benar. Tidak hanya itu, cara ini juga bisa digunakan terhadap penilaian ketepatan dalam menjawab. Menurut Alma (2012) memberikan cara untuk melakukan *prompting* yaitu: (1) memberikan informasi tambahan yang aktual sehingga siswa mampu menjawab pertanyaan yang diberikan (2) pertanyaan dirubah dalam bentuk lain; (3) pertanyaan semula dipecahkan atau dipisahkan menjadi beberapa sub pertanyaan sehingga akhirnya semua siswa dapat menjawab.

Dalam penelitian ini yang ingin diteliti meliputi dua hal, bagaimana pengaruh pendekatan *probing-prompting learning* menggunakan struktur *three-minutes review* terhadap peningkatan tingkat kemampuan pemahaman nilai-nilai pancasila dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, serta bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan pendekatan *probing-prompting learning* menggunakan struktur *three-minutes review*.

METODE

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, karena penelitian ini disajikan dengan data yang berupa angka-angka. Menurut Arikunto (2006 :12) bahwa, “penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang banyak dituntut menggunakan angka, mulai pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan hasilnya”. Selain itu digunakan pula pendekatan kualitatif karena pada proses pengumpulan data dilakukan angket dan lembar observasi. Menurut Suigono (2012:13), “metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna”.

Metode yang digunakan adalah metode kuasi eksperimen. Ruseffendi (2010:52) mengatakan “pada kuasi eksperimen subjek tidak dikelompokkan secara acak, tetapi peneliti menerima keadaan subjek seadanya”. Sehingga dalam penelitian dengan metode eksperimen peneliti menerima keadaan subjek seadanya.

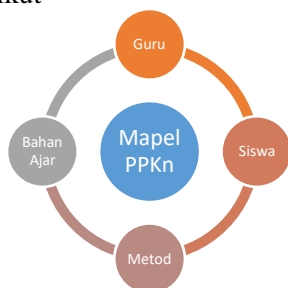
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 18 Bandung. Untuk memudahkan dalam pengambilan data, maka diambil sebagian dari populasi yaitu yang dinamakan sampel. Sudjana (2005:6) mengatakan bahwa, “sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi”. Adapun pemilihan sampel dalam penelitian tidak dilakukan secara random kelas, tetapi peneliti menerima sampel seadanya. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII-3 sebagai kelas eksperimen (pembelajaran dengan pendekatan *probing-prompting learning* menggunakan *three-minutes review*) dan siswa kelas VIII-4 sebagai kelas kontrol (pembelajaran konvensional)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan Kurangnya Pemahaman terhadap Pancasila di Sekolah

Pendidikan pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di sekolah merupakan satu mata pelajaran yang mengembangkan karakter dan kepribadian dalam rangka membentuk warga negara yang baik (*Smart and good citizen*), yang harus mendukung bangsa dan Negara Indonesia. Hal tersebut, menjadi bekal dasar bagi para guru mata pelajaran PPKn yang harus dapat mengajarkan secara komprehensif baik *civic knowledge, civi disposition dan civic skills* sehingga ketiga ranah tersebut terbentuk secara nyata dalam diri setiap siswa.

Hasil observasi di lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa ada beberapa permasalahan pembelajaran yang dapat berpengaruh terhadap efektivitas mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, terutama tentang pancasila. Gambar permasalahan pembelajaran PPKn di sekolah sebagai berikut



Gambar 3. Permasalahan Pembelajaran Pancasila di Sekolah

Gambar tersebut menunjukkan bahwa ada beberapa unsur penting yang berpengaruh sehingga menyebabkan munculnya permasalahan-permasalahan pembelajaran tentang pancasila yang ada di sekolah. Pertama, Guru, yang merupakan unsur pokok dalam proses pembelajaran. Hasil analisis data di lapangan, peneliti menunjukkan bahwa keaktifan guru masih kurang dan perlu ditingkatkan karena masih fokus pada buku teks dan pembelajarannya kurang inovatif. Kompetensi guru masih perlu dikembangkan dan komitmen guru dalam pembelajaran tentang pancasila perlu dikuatkan yaitu dengan Pendekatan *probing-prompting learning*

Kedua, siswa yang merupakan unsure penting juga dalam suatu proses pembelajaran. Hasil analisis data di lapangan menunjukkan bahwa keaktifan peserta didik untuk belajar mengenai pancasila masih perlu ditingkatkan. Siswa seakan jenuh dan bosan terhadap pancasila yang hanya bacaan dan hafalan sehingga dalam pelaksanaannya kurang di aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Ketiga, metode pembelajaran merupakan pisau yang dipakai pendidik dalam membelajarkan tentang pancasila kepada siswa di sekolah. Hasil analisis data menunjukan bahwa metode pembelajaran yang dipakai masih monoton atau konvensional dan belum di aplikasikan dengan teknologi sehingga mengaktifkan siswa dalam belajar. Metode masih perlu dikembangkan secara inovatif dan kreatif sehingga dapat meningkatkan keaktifan dan pengamalan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Keempat, bahan ajar merupakan bahan yang dibelajarkan kepada siswa, bahan ajar ini harus actual dengan pancasila sesuai dengan perkembangan keilmuan, tidak boleh miskonsepsi dan sesuai dengan teoritik yang benar. Hasil analisis data menunjukkan bahwa bahan ajar masih banyak aspek *knowledge* saja, padahal aspek *skill* dan *disposition* juga harus dibentuk.

Pendekatan *probing-prompting learning*

Majid (2013:20) menyatakan bahwa pendekatan pembelajaran adalah skenario yang digunakan guru untuk membelajarkan siswa dalam rangka mencapai suatu tujuan pembelajaran. Pendekatan *probing-prompting learning* merupakan termasuk pendekatan pembelajaran. Menurut arti katanya, *probing* adalah penyelidikan dan pemeriksaan, sementara *prompting* adalah mendorong atau menuntun. (Huda, 2014 : 281).

Pembelajaran *probing-prompting* sangat erat kaitannya dengan pertanyaan dan jawaban. Menurut Huda (2014:281), “pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan pada saat pembelajaran itu disebut *probing question*”. Kemudian Suherman (Huda, 2014 : 281) mengemukakan bahwa, *probing question* adalah pertanyaan yang bersifat menganalisis dan mengkaji untuk mendapatkan jawaban lebih mendalam dari siswa yang bermaksud untuk mengembangkan kualitas jawaban, sehingga jawaban berikutnya lebih jelas, akurat dan beralasan”. Dengan adanya *probing question* atau pertanyaan masalah, dapat mendorong atau memotivasi siswa untuk memahami suatu masalah dengan lebih mendalam sehingga siswa mampu mencapai jawaban yang dituju. Selama proses pencarian dan penemuan jawaban siswa dituntut untuk mengemukakan pendapat sehingga berusaha menghubungkan pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki dengan pertanyaan yang akan dijawab.

Proses tanya jawab dalam pembelajaran dilakukan dengan acak sehingga setiap siswa dituntut untuk berpartisipasi aktif. Akibatnya siswa tidak bisa menghindari proses pembelajaran, karena setiap saat ia bisa dilibatkan dalam proses tanya jawab. Sehingga untuk menghindari ketakutan siswa dalam menjawab, guru berperan menuntun siswa untuk mencapai jawaban yang dituju. Berdasarkan penelitian Priatna (Huda, 2014), proses *probing* menuntut konsentrasi dan keaktifan sehingga dapat mengaktifkan siswa dalam belajar yang penuh tantangan. Selain itu, perhatian siswa

terhadap pembelajaran dan materi pelajaran cenderung lebih terjaga karena siswa selalu mempersiapkan jawaban apabila tiba-tiba ditunjuk oleh guru.

Sudarti (Huda, 2014 : 282) menjelaskan langkah-langkah pembelajaran *probing-prompting* dijabarkan melalui tujuh tahapan teknik *probing* yang kemudian dikembangkan dengan *prompting* sebagai berikut :

- a. guru menghadapkan siswa pada situasi baru, misalkan dengan memberikan gambar implementasi nilai pancasila dalam masyarakat, video kekerasan, atau situasi lainnya yang mengandung permasalahan
- b. memberikan kesempatan kepada siswa untuk menganalisis dan merumuskan jawaban dari permasalahan yang dikaji.
- c. guru mengajukan masalah atau persoalan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran atau indikator kepada siswa
- d. memberikan kesempatan kepada siswa untuk merumuskan jawaban atau melakukan diskusi kecil
- e. menunjuk salah satu siswa untuk menjawab pertanyaan.
- f. jika jawabannya tepat, maka guru meminta tanggapan kepada siswa lain tentang jawaban tersebut untuk meyakinkan bahwa seluruh siswa terlibat dalam kegiatan yang sedang berlangsung. Namun, jika siswa tersebut mengalami kemacetan jawaban atau jawaban yang diberikan kurang tepat, maka guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan lain yang jawabannya merupakan petunjuk jalan penyelesaian jawaban. kemudian, guru memberikan pertanyaan yang menuntut siswa berpikir pada tingkat yang lebih tinggi, hingga siswa dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan kompetensi dasar atau indikator. Pertanyaan yang diajukan pada langkah keenam ini sebaiknya diberikan pada beberapa siswa yang berbeda agar seluruh siswa terlibat dalam seluruh kegiatan *probing-prompting*
- g. guru mengajukan pertanyaan akhir pada siswa yang berbeda supaya lebih menekankan bahwa indikator tersebut benar-benar telah dipahami oleh seluruh siswa.

Struktur *three-minutes review* merupakan struktur pembelajaran yang dikembangkan oleh Spencer Kagan dengan sintaks utama yaitu melakukan tinjauan selama tiga menit. Struktur pembelajaran ini dapat dibentuk sbagai pembelajaran kooperatif atau kolaboratif sesuai keinginan guru. Dapat berupa diskusi seluruh

kelas atau membagi siswa menjadi 3 sampai 4 kelompok dengan jumlah anggota 4 sampai 6 orang tergantung pada jumlah siswa. Kegiatan struktur *three-minutes review* dapat mendorong siswa mendengarkan dengan cermat penjelasan dari guru dan siap secara spontan untuk menjawab pertanyaan- pertanyaan yang diajukan guru.

Warsono dan Hariyanto (2013:221), menjelaskan langkah-langkah pembelajaran struktur *three-minutes review* (TMR) sebagai berikut :

- a. guru menyajikan suatu presentasi bahan ajar atau berdiskusi bersama seluruh kelas dalam kelas (*whole class discussion*) atau meminta kelompok-kelompok siswa yang beranggotakan 4-6 orang untuk berdiskusi tentang suatu masalah
- b. guru mengumumkan kepada seluruh kelas bahwa bergantung kepada penilaian guru terhadap kemajuan pembelajaran. Guru akan menghentikan kegiatan diskusi siswa sewaktu-waktu.
- c. seluruh siswa atau kelompok-kelompok siswa melanjutkan kegiatan semula
- d. guru mengatakan “*stop*”. Kegiatan berhenti, kemudian seluruh siswa atau kelompok siswa diberi waktu 3 menit untuk melakukan tinjauan terhadap apa yang diajarkan oleh guru atau didiskusikan dalam kelompok kecil tadi. Para siswa dapat mengajukan pertanyaan klarifikasi kepada guru.

Berikut ini akan dijelaskan alasan mengapa peningkatan kemampuan pemahaman nilai-nilai pancasila siswa kelas eksperimen mendapat pembelajaran pendidikan kewarganegaraan melalui pendekatan *probing-prompting learning* menggunakan sturktur *three minutes review* lebih tinggi dibandingkan peningkatan kemampuan pemahaman nilai-nilai pancasila kelas kontrol dengan pembelajaran konvensional.

- a. Membandingkan dan membedakan konsep-konsep dilakukan dengan cara menuntun untuk menggali siswa kemampuan memahami materi bukan hanya hafal akan teori tetapi lebih dari itu yaitu lebih mengerti konsep materi pelajaran itu sendiri. Untuk mengerti akan konsep diperlukan proses berpikir dengan menggali gagasan. Dengan adanya tuntutan untuk menggali gagasan siswa, guru berperan dalam menuntun siswa untuk membandingkan dan membedakan konsep-konsep. Menuntun dengan menggali gagasan siswa merupakan proses dari

pembelajaran *probing-prompting*. Hal ini sejalan dengan pendapat Suherman (Huda, 2014 : 281) adalah pembelajaran dengan menyajikan serangkaian pertanyaan-pertanyaan untuk menggali gagasan siswa sehingga yang mampu mengaitkan pengetahuan dan pengalaman dengan pengetahuan baru yang sedang dipelajari.

Kelas eksperimen merupakan kelas yang mendapat tuntunan untuk menggali gagasan siswa yang merupakan inti dari pembelajaran *probing-prompting*. Siswa kelas eksperimen selain mendapat *probing* yaitu masalah yang tertuang dalam LKS dan masalah dari proses tanya jawab antara guru dan siswa, juga mendapat *prompt* yaitubantuan. *Prompt* yang diberikan ada tiga sesuai pendapat Dougherty (Sari, 2013 : 14-15) menyatakan bahwa terdapat tiga tipe *prompt* yaitu (a) *content*; (b) proses; dan (c) *affective/attitudinal*. *Prompt* yang pertama adalah konten *prompt* difokuskan pada topik atau konsep serta hubungannya. Pada *prompt* ini siswa diarahkan untuk membandingkan, membedakan, atau mengkonstruksi antar konsep. *Prompt* yang kedua adalah *process prompt*, yakni menawarkan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan tentang pemilihan cara/teknik atau strategi yang digunakan dari banyak teknik dan strategi yang mungkin dalam menyelesaikan tugas. Bantuannya yaitu sebagai contoh ada banyak cara untuk menyelesaikan soal ini, cara mana paling disukai, mengapa kalian memilih strategi ini, dan sebagainya. *Prompt* yang ketiga adalah *affective/attitudinal prompt*, yakni mendorong siswa untuk bekerja keras.

Prompt ini diberikan supaya siswa memiliki keyakinan atau pandangan (*belief*) yang baik terhadap pendidikan kewarganegaraan. Bantuannya yaitu misalkan siswa diajak untuk lebih tertarik dengan pendidikan kewarganegaraan dengan memberikan contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, mengajak siswa menaati peraturan di lingkungan masyarakat.

- b. Menggunakan model, gambar, dan simbol-simbol untuk mempresentasikan suatu konsep dilakukan dengan cara menghadapkan siswa pada situasi baru. Dalam langkah PPL guru menghadapkan siswa pada situasi baru dengan membedakan gambaran atau situasi lainnya yang mengandung permasalahan. Permasalah yang diambil merupakan permasalahan yang

dipecahkan sesuai materi yang sedang dipelajari. Permasalahan diajukan melalui pertanyaan dari guru kepada siswa. Guru pun memberikan kesempatan kepada siswa berdiskusi untuk merumuskan jawaban terhadap permasalahan yang diberikan. Sehingga secara tidak langsung siswa menggunakan gambar dan situasi lainnya untuk mempresentasikan konsep yang sedang dipelajari

- c. Mengidentifikasi dan membuat contoh tentang pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan dilakukan dengan cara berdiskusi dan menunjuk siswa

Cara berdiskusi dan menunjuk siswa merupakan termasuk langkah PPL. Untuk mengidentifikasi suatu konsep, siswa dipersilahkan untuk melakukan diskusi. Dengan demikian siswa saling mengemukakan pendapat dengan teman diskusinya. Selain itu siswa dipersilahkan membuat contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila dari suatu konsep melalui pertanyaan yang ada dalam LKS. Kemudian guru menunjuk salah satu siswa untuk menjelaskan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di depan kelas.

- d. Mengenal berbagai makna dan interpretasi konsep dilakukan dengan cara menuntun siswa berpikir pada tingkat yang lebih tinggi. Pada langkah keempat pendekatan *probing-prompting learning* yaitu menuntun siswa berpikir, pada langkah ini guru memegang peranan penting dalam mengarahkan siswa berpikir. Sehingga secara tidak langsung siswa berpikir dan mengenal berbagai makna dan interpretasi konsep dari pertanyaan yang diajukan oleh guru atau pertanyaan yang tertuang dalam LKS. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan merupakan proses *probing*, dimana menuntun konsentrasi dan keaktifan siswa. Hal ini sejalan dengan Priatna (Huda, 2014), proses *probing* menuntun konsentrasi dan keaktifan sehingga dapat mengaktifkan siswa dalam belajar yang penuh tantangan. Dengan demikian siswa dituntut berpikir pada tingkat yang lebih tinggi

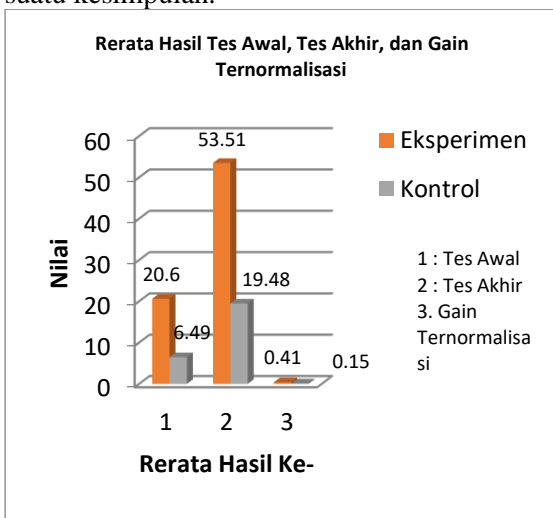
- e. Mengidentifikasi sifat-sifat suatu konsep dan mengenal syarat yang menentukan suatu konsep dilakukan dengan cara melakukan tinjauan

Inti dari pembelajaran dengan struktur *three-minutes review* adalah melakukan tinjauan selama tiga menit. Hal ini dilakukan untuk mempersilahkan siswa untuk mengajukan

pertanyaan klarifikasi atau menjawab pertanyaan guru, yang merupakan salah satu langkah struktur *three-minutes review*. Pada langkah ini guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan tinjauan serta analisis terhadap materi yang dipelajari. Sehingga secara tidak langsung siswa mengidentifikasi sifat-sifat suatu konsep. Selain mengidentifikasi, dengan adanya tinjauan memungkinkan siswa untuk mengenal syarat yang menentukan suatu konsep. Dalam melakukan tinjauan, siswa dituntut untuk berdiskusi. Sehingga terjadi interaksi dan tukar pendapat dengan teman diskusi. Hal ini karena struktur *three-minutes review* merupakan struktur pembelajaran kooperatif. Sebagaimana yang dikemukakan warsono dan hariyanto (2013:187) bahwa “struktur pembelajaran kooperatif adalah strategi pembelajaran kooperatif yang sangat khusus, sehingga guru dapat menggunakannya untuk mengorganisasikan interaksi antar siswa”

Kemampuan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan pokok bahasan Pancasila, didapat data-data hasil penelitian dari hasil tes awal dan akhir, hasil observasi aktivitas guru, dan angket kepada siswa. Kemudian dilaksanakan pengolahan data dan penganalisisan data, sehingga didapatkan suatu kesimpulan.



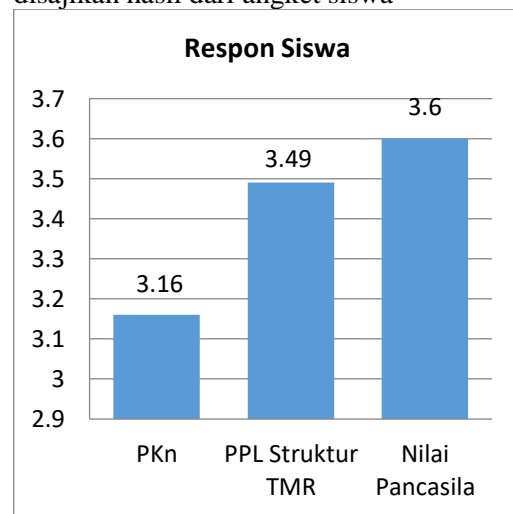
Gambar 3. Diagram Rerata Hasil Tes Awal, Tes Akhir dan Gain Ternormalisasi

Berdasarkan kesimpulan pada analisis data hasil gain ternormalisasi kemampuan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila yaitu disimpulkan bahwa ada pengaruh pendekatan

probing-prompting learning menggunakan struktur *three minutes review* terhadap peningkatan kemampuan pemahaman nilai-nilai Pancasila. Artinya peningkatan kemampuan pemahaman nilai-nilai Pancasila siswa kelas eksperimen lebih baik dibandingkan kemampuan pemahaman nilai-nilai Pancasila siswa kelas kontrol. Dengan kategori pengaruh tinggi. Meningkatnya kemampuan pemahaman nilai-nilai Pancasila kelas eksperimen karena adanya perlakuan yang berbeda antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Peningkatan kemampuan pemahaman nilai-nilai Pancasila siswa kelas eksperimen karena mendapat pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan pendekatan *probing-prompting learning* menggunakan struktur *three minutes review*, sedangkan kelas control mendapat pembelajaran konvensional dengan pembelajaran ekspositori.

Respon siswa terhadap pendekatan PPL menggunakan struktur TMR

Berdasarkan hasil analisis angket siswa diperoleh bahwa respon siswa terhadap pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan menggunakan pendekatan PPL menggunakan struktur TMR adalah positif. (a) respon siswa terhadap pendidikan kewarganegaraan; (b) respon siswa terhadap pendekatan *probing-prompting learning* (PPL) menggunakan struktur *three-minutes review* (TMR); (c) respon siswa terhadap kemampuan pemahaman nilai-nilai Pancasila. Berikut akan disajikan hasil dari angket siswa



Gambar 3. Diagram hasil analisis angket siswa
Secara umum, siswa menyukai pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan menggunakan pendekatan PPL menggunakan struktur TMR ini, karena mereka dapat belajar dengan santai dan berdiskusi tanpa rasa tegang. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya

rerata skor pernyataan nomor 7 (belajar pendidikan kewarganegaraan dengan pendekatan PPL menggunakan struktur TMR membuat saya percaya diri untuk menyampaikan pendapat mengenai cara menyelesaikan soal pendidikan kewarganegaraan dengan teman lainnya) yaitu 3,87. Selain itu, besarnya rerata respon siswa terhadap kemampuan pemahaman nilai-nilai pancasila dan respon terhadap pendidikan kewarganegaraan semakin menunjukkan bahwa pembelajaran dengan pendekatan PPL menggunakan struktur TMR direspon positif oleh siswa. Dengan adanya diskusi kelas siswa semakin menunjukkkankepercayaan diri yang tinggi, lebih berani bertanya maupun menjawab pertanyaan, dan kecenderungan untuk menyukai aktivitas diskusi. Pemahaman terhadap keyakinan siswa artinya siswa yang memahami pendidikan kewarganegaraan dengan baik akan mempunyai keyakinan yang positif yang pada akhirnya membantu perkembangan pengetahuan pendidikan kewarganegarannya. Rata-Rata keseluruhan dari hasil angket adalah 3,42 atau 68,4% yaitu 22 dari 32 siswa dengan respon positif. Untuk itu dalam pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan PPL menggunakan struktur TMR ini perlu kepiawaian guru dalam mengatur kelas terutama kesesuaian waktu yang tersedia dengan materi pendidikan kewarganegaraan yang akan diajarkan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

- 1) Ada pengaruh pendekatan *probing-prompting learning* menggunakan struktur *three-minutes review* terhadap peningkatan kemampuan pemahaman nilai-nilai pancasila
- 2) Siswa memberikan respon positif terhadap pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan pendekatan *probing-prompting learning* menggunakan struktur *three-minutes review*

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Buchari. (2012). *Guru Profesional Menguasai Metode dan Terampil Mengajar*. Bandung : Alfabeta.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.

- Borg dkk. (1983). *Educational Research an Introductory*. New York : Longman.
- Branson, dkk. (1998). *Belajar Civic Education dari Amerika*. Yogyakarta : LKIS
- Cogan, John & Ray Derricot. (1988). *Citizenship Education For 21st Century; Setting the Contex*. London : Kogan Page
- David Bouchier. (2007). *Pancasila versi orde baru dan asal muasal Negara organis*. Yogyakarta : Aditya Media
- Diasputri, Ajeng., Nurhayati, Sri., & Sugiyo, Warlan. (2013). *Pengaruh Model Pembelajaran Probing-Prompting Berbantuan Lembar Kerja Berstruktur Terhadap Hasil Belajar*. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 7(1), 1103-1111
- Ghufron, M. N. & Risnawati, R. 2014. *Teori-teori psikologi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Huda, M. (2014). *Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran Isu-Isu Metodis dan Pragmatis*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Jacobsen, D.A. (2009). *Methods for teaching: promoting student learning in k-12 classrooms*. alih bahasa Achmad Fawaid & Khoirul Anam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kaelan. (2001). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta : Paradigma.
- Kaelan. (2007). *Revitalisasi dan Reaktualisasi Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara dan Ideologi*. Yogyakarta :: Lima
- Lexy, M. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosdakarya.
- Listono, Santoso. (2003). *Konstruksi Ideologi Negara, Suatu Upaya Membaca Ulang Pnacasila*. Yogyakarta : Ningsrat.
- Majid, A. (2013). *Strategi Pembelajaran*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya

- Mahfudd, MD. (1998). *Pancasila sebagai Paradigma Pembaharuan Tatanan Hukum*. Jurnal Filsafat Pancasila, 2(2), 55-67.
- Muchtarom, M., Widodo, Susilo Tri., & Utomo. (2013). *Strategi Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Melalui Inovasi Pembelajaran PkN Berorientasi Civic Knowledge, Civic Disposition, dan Civic Skills*. Jurnal PPKn, 1(2), 152-174
- Mustafa, K. (1998). Pancasila dalam tinjauan Historis, Yuridis, dan Filosofis. Yogyakarta : Citra Karsa Mandiri.
- Ngalimun. (2012). *Strategi dan model pembelajaran*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Notonagoro. (1982). *Beberapa hal mengenai Falsafah Pancasila*. Jakarta : Pantjuran Tujuh.
- Pranarka. (1985). *Sejarah Pemikiran Pancasila*. Jakarta : CSIS.
- Rejekiingsih, dkk. (2013). *Pengembangan Bahan Ajar Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Pilar Kebangsaan di Perguruan Tinggi*. Jurnal PPKN, 1(2), 187-198.
- Ruseffendi, E.T. (2010). *Dasar-Dasar Penelitian Pendidikan dan Bidang Non-Eksakta Lainnya*. Bandung : Tarsito.
- Sari, D. (2013). *Pengaruh Penggunaan Strategi Writing From A Prompt dan Writing in Performance Task Terhadap Pemecahan Masalah Siswa SMP*. Bandung : Tidak Diterbitkan
- Sudjana. (2005). *Metode Statistika*. Bandung : Tarsito.
- Sugiono. (2012). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta
- Suherman, et.al. 2003. *Strategi pembelajaran matematika kontemporer*. Bandung: JICA UPI.
- Suprijono, Agus. (2011). *Coeprative learning teori dan aplikasi PAIKEM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suryono H, dkk. (2013). Pengembangan Bahan Ajar Pendidikan Pancasila dalam Menumbuhkan Kepribadian. Jurnal PPKn, 1(2), 207-218.
- Triastuti, R & Wijianto. (2013). *Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Guna Mendukung Ketahanan Ideologi Kebangsaan*. Jurnal PPKn, 1(2), 226-234.
- Ulya, H., Masrukan & Kartono. (2012). *Keefektifan Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Probing-Prompting Dengan Penilaian Produk*. UJME, 1(1), 30-39
- Wahab, Abdul A & Sapriya (2011). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.
- Warsono, dan Hariyanto. (2013). *Pembelajaran Aktif Teori dan Assesmen*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Winkel. (1991). *Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar*. Jakarta: Gramedia.
- Woolfolk, A. (2009). *Educational psychology: active learning edition*. Boston: Pearson Education.